

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIAMIS**

2023

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 220
Kell. Sindangrasa Kec. Ciamis
Kabupaten Ciamis
(0265) 773000

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2023.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, dan Misi instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan pemerintah yang baik, sehingga perlu dikembangkan dan disusun suatu media pertanggungjawaban yang sistematis, melembaga serta upaya untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) belum sepenuhnya sempurna akurat dalam menilai tolak ukur kinerja instansi pemerintah, walaupun demikian semoga dapat dijadikan ukuran atau nilai tolak ukur kinerja bagi aparatur instansi pemerintah khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis dalam menunjang program pembangunan daerah.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, semoga dapat dijadikan tolak ukur kinerja sebagai cermin dalam rangka pelaksanaan tugas pada masa yang akan datang.

Ciamis, 12 Februari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIAMIS



H. TINO ARMYANTO L S, S.T., M.Si.

Pembina Tk 1, IV/b

NIP. 197503042001121002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis serta program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun secara periodik.

Penyusunan LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun 2023 memuat ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen perjanjian kinerja. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran yang disertai dengan penjelasan memadai atas pencapaian kinerja serta perbandingan capaian indikator kinerja sasaran. Laporan ini menyajikan informasi yang relevan menyangkut keberhasilan dan atau kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan pencapaian sasaran strategis serta program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah ditetapkan 3 sasaran strategis dengan 5 indikator sasaran. Secara umum pencapaian kinerja sasaran menunjukkan keberhasilan sesuai dengan target kinerja yang disepakati, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 102.72%, dengan capaian kinerja setiap sasaran sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Keterangan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai LHE AKIP	BB	BB	100 %	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Keterangan
	Kinerja Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP	3	3	100 %	
		Kualitas Laporan Keuangan	840	835.87	99.51 %	
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	IKM Diskominfo	85.00	91.43	107.56 %	
3	Tatakelola Pemerintahan yang efektif dan Efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Kematangan SPBE	2.90	3.09	106.55 %	

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Orgnasiasi Dinas Komunikasi dan Informatika	2
C. Isu Strategis	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika	19
B. Perjanjian Kinerja	20
C. Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja	26
B. Akuntabilitas Keuangan	34
C. Prestasi Dinas Komunikasi dan Informatika	40
BAB IV PENUTUP	41

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1	Kondisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin 13
Tabel 1.2	Kondisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat 14
Tabel 1.3	Kondisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan 15
Tabel 1.4	Kondisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Eselonering/ Fungsional 16
Tabel 2.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 20
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 21
Tabel 2.3	Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 22
Tabel 2.4	Anggaran Program dan Penanggung Jawab Dinas Komunikasi dan Informatika 25
Tabel 3.1	Data Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun 2023 26
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Nilai LHE AKIP Tahun 2023 28
Tabel 3.3	Data Capaian Kinerja Nilai LHE AKIP Tahun 2021-2023 28
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Level Maturitas SPIP Tahun 2023 29
Tabel 3.5	Data Capaian Kinerja Level Maturitas SPIP Tahun 2021-2023 29
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Persentase Kualitas Laporan Keuangan Tahun 2023 30
Tabel 3.7	Data Capaian Kinerja Kualitas Laporan Keuangan Tahun 2021-2023 30
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 32
Tabel 3.9	Data Capaian Kinerja Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021-2023 32

Tabel 3.10	Capaian Kinerja Indeks Kematangan SPBE Tahun 2023	33
Tabel 3.11	Data Capaian Kinerja Indeks Kematangan SPBE Tahun 2021-2023	34
Tabel 3.12	Data Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun 2023	34
Tabel 3.13	Tabel Prestasi/ Penghargaan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023	40

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis	13

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Gerafik 1.1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis 13
Grafik 1.2	Kondisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat 15
Grafik 1.3	Kondisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan 16
Grafik 1.4	Kondisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Berdasarkan Eselonering/ Fungsional 17

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2023
- LAMPIRAN II PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2023
- LAMPIRAN III LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya berdasarkan pada perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah.

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah serta pelaksanaan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan daerah yang diamanatkan oleh Kepala Daerah kepada para Perangkat Daerah dimana, LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 menggambarkan upaya pencapaian sasaran strategis sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan menyajikan data dan informasi yang disertai dengan analisis dan interpretasi pencapaian kinerja, sehingga pelaporan tidak hanya memuat data namun juga informasi yang cukup memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja. LKIP hal ini

sebagai alat kendali dan pemotivasi peningkatan kinerja dan pembenahan manajemen internal di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

Selanjutnya fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- c. pelaksanaan tugas sebagai *Government Chief Information (GCIO)*;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, berikut adalah susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika :

1. Pimpinan adalah Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- c. pelaksanaan tugas sebagai *Government Chief Information (GCIO)*;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Dinas;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
- f. penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
- g. penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- h. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- l. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Perencanaan

Fungsional Perencana Ahli Muda Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri satu atau lebih jenis Jabatan Fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- (4) Dalam hal penugasan diberikan dalam bentuk tim kerja dapat ditunjuk seorang Pejabat Fungsional untuk berperan sebagai ketua tim.
- (5) Penunjukan ketua tim dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan di lingkungan Dinas. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;

- b. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
- c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPTD;
- f. pelaksanaan verifikasi keuangan;
- g. pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
- h. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian, pengelolaan aset/barang milik daerah dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- b. penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. pengelolaan perlengkapan Dinas;

- e. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- g. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
- h. pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang informasi dan komunikasi publik. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja kegiatan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. penyusunan dan evaluasi rencana operasional di bidang informasi dan komunikasi publik;
- d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dalam mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
- e. penyelenggaraan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;

- f. pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi publik, literasi informasi dan layanan hubungan media;
 - g. penyelenggaraan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring, supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Daerah;
 - i. pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan infrastuktur dan/atau sarana komunikasi dalam rangka diseminasi informasi;
 - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang informasi dan komunikasi publik;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- a. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
 - ii. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri satu atau lebih jenis Jabatan Fungsional.
 - iii. Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
 - iv. Dalam hal penugasan diberikan dalam bentuk tim kerja dapat ditunjuk seorang Pejabat Fungsional untuk berperan sebagai ketua tim.

- v. Penunjukan ketua tim dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
- vi. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- vii. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

4. Bidang Aplikasi Informatika dan Layanan *E-Government*

Bidang Aplikasi Informatika dan Layanan E-Government dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Aplikasi Informatika dan Layanan E-Government sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang Aplikasi Informatika dan Layanan E-Government. Bidang Aplikasi Informatika dan Layanan E-Government dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja kegiatan di bidang Aplikasi Informatika dan Layanan E-Government;
- b. perumusan kebijakan teknis dan evaluasi rencana operasional di bidang Aplikasi Informatika dan Layanan E-Government;
- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi;
- d. perumusan kebijakan pembangunan, pengembangan aplikasi, layanan dan tatakelola sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- e. perumusan kebijakan pengembangan dan pengelolaan ekosistem sistem pemerintahan berbasis elektronik
- f. perumusan penatalaksanaan, pembinaan dan pengawasan domain dan sub domain Pemerintah Daerah;
- g. perumusan kebijakan pengembangan dan pengelolaan ekosistem sistem pemerintahan berbasis elektronik dan kota cerdas (smart city);
- h. perumusan kebijakan pengembangan dan pengelolaan data, integrasi dan interoperabilitas sistem informasi serta pengembangan sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP);

- i. perumusan kebijakan, perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan layanan sistem jaringan intra pemerintah daerah kabupaten;
- j. perumusan kebijakan, perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten;
- k. pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Aplikasi Informatika dan Layanan E-Government;;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri satu atau lebih jenis Jabatan Fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- (4) Dalam hal penugasan diberikan dalam bentuk tim kerja dapat ditunjuk seorang Pejabat Fungsional untuk berperan sebagai ketua tim.
- (5) Penunjukan ketua tim dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(7) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

5. Bidang Statistik

Bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Statistik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang statistik. Bidang Statistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja Bidang Statistik ;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang Statistik;
- c. perumusan dan pengoordinasian kebijakan penyelenggaraan statistik sektoral;
- d. perumusan dan pengoordinasian kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
- e. perumusan dan pengoordinasian kebijakan pembangunan metadata statistik sektoral;
- f. perumusan perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur data statistik sektoral;
- g. perumusan dan pengoordinasian manajemen data sektoral;
- h. pengoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyimpanan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
- i. pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang statistik;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang statistik;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri satu atau lebih jenis Jabatan Fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- (4) Dalam hal penugasan diberikan dalam bentuk tim kerja dapat ditunjuk seorang Pejabat Fungsional untuk berperan sebagai ketua tim.
- (5) Penunjukan ketua tim dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

6. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan di bidang persandian dan keamanan informasi. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja di bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- c. perumusan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan tata kelola Persandian dan Keamanan Informasi ;
- d. perumusan dan pengoordinasian pengelolaan sumber daya keamanan informasi, pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik, penyediaan layanan keamanan dan pengamanan informasi dan komunikasi;
- e. perumusan dan pengoordinasian layanan *security operating centre* (SOC);

- f. perumusan dan pengelolaan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT);
- g. perumusan dan pengoordinasian penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- h. pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengelola persandian dan keamanan informasi;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

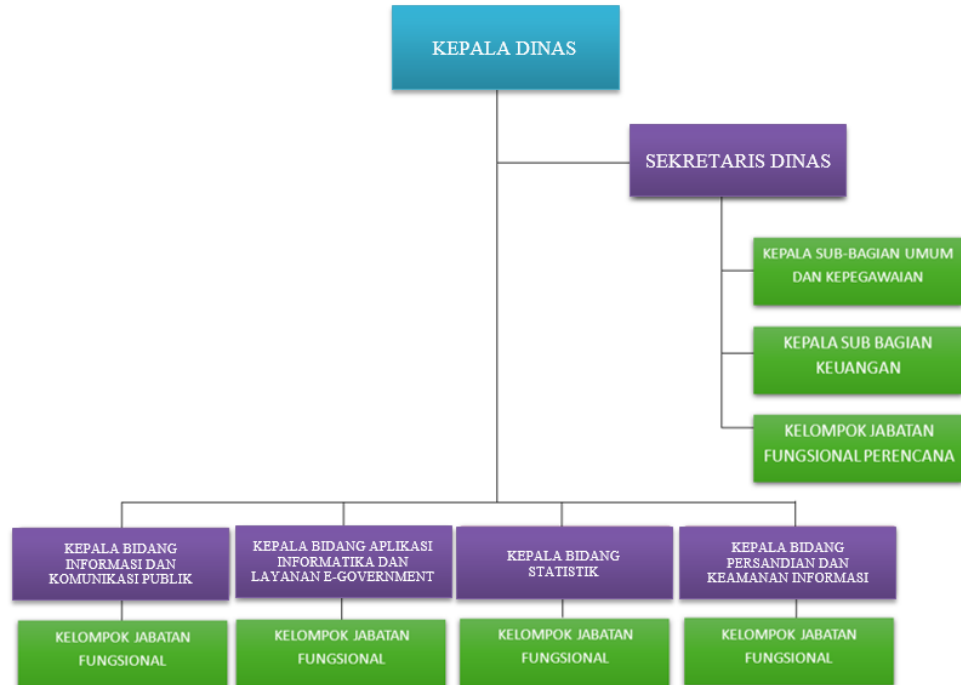
a. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri satu atau lebih jenis Jabatan Fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- (4) Dalam hal penugasan diberikan dalam bentuk tim kerja dapat ditunjuk seorang Pejabat Fungsional untuk berperan sebagai ketua tim.
- (5) Penunjukan ketua tim dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Ciamis



Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis memiliki komposisi pegawai sebanyak 19 orang, dapat dilihat pada tabel berikut:

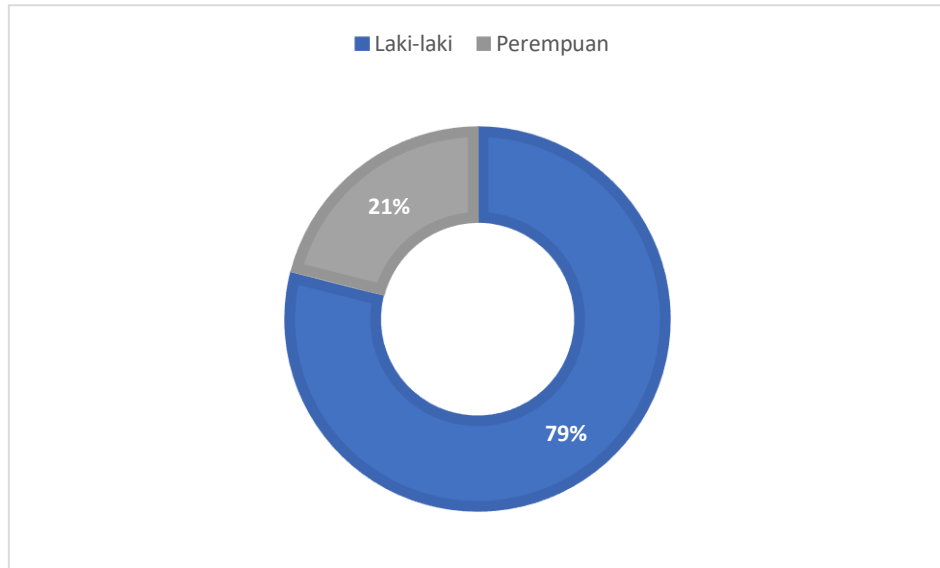
Tabel 1. 1

Kondisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1.	Pimpinan/ Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretariat	2	3	5
3.	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	4	-	4
4.	Bidang Aplikasi Informatika dan Layanan <i>E-Government</i>	3	-	3
5.	Bidang Statistik	3	1	4
6.	Bidang Persandian	2	-	2

Grafik 1. 1

Kondisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin



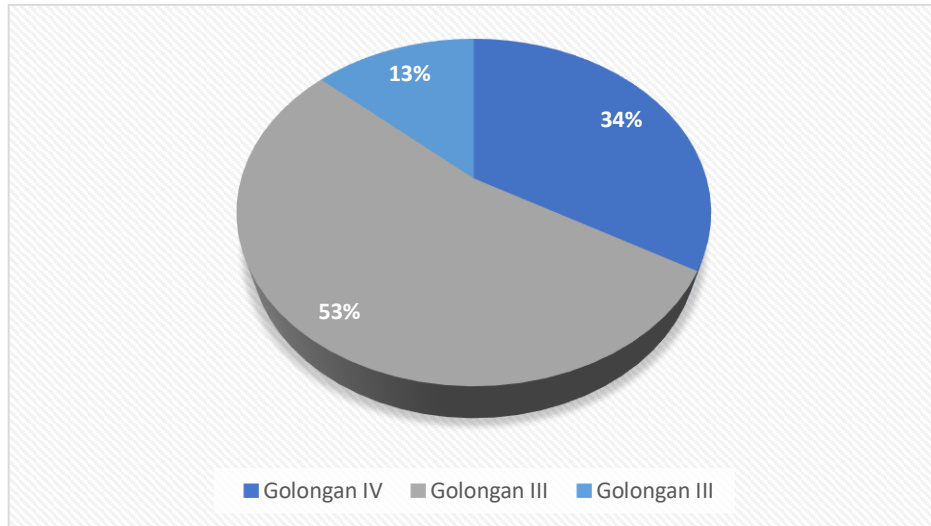
Tabel 1. 2

Kondisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat

No	Pangkat/Golongan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1.	Golongan IV	5	-	5
2.	Golongan III	8	4	12
3.	Golongan II	2	-	2

Grafik 1. 2

Kondisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat



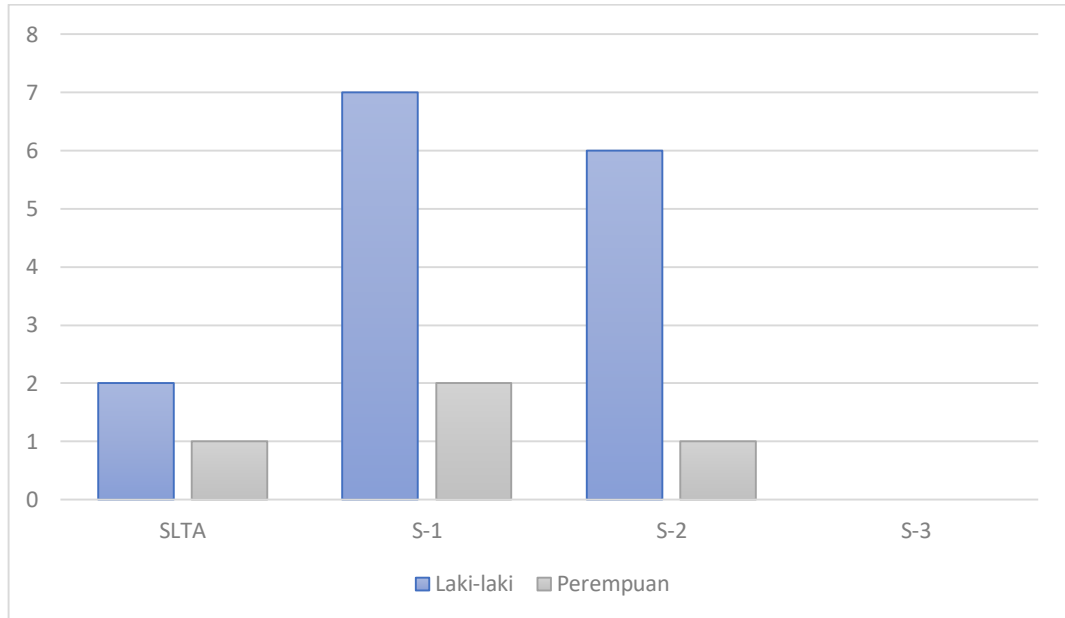
Tabel 1. 3

Kondisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1.	SLTA	2	1	3
2.	S-1	7	2	9
3.	S-2	6	1	17
4.	S-3	0	0	0

Grafik 1. 3

Kondisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan



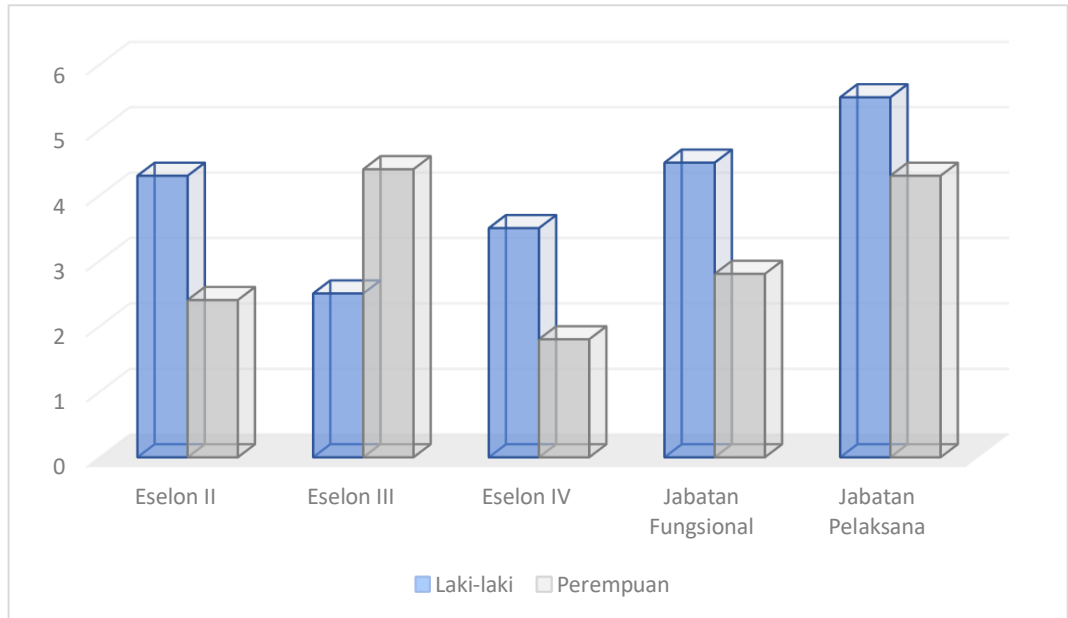
Tabel 1. 4

Kondisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Eselonering/Fungsional

No	Eselon	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	5	-	5
3.	Eselon IV	-	2	2
4.	Jabatan Fungsional	7	1	8
5.	Jabatan Pelaksana	2	1	3

Grafik 1. 3

Kondisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Berdasarkan Eselonering/Fungsional



C. Isu Strategis

Dengan memperhatikan situasi lingkungan strategi nasional, daerah, serta internal, terdapat 8 (delapan) isu strategis pada penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

1. Pembangunan dan pengembangan Data Center sebagai pusat data Pemerintah kabupaten Ciamis;
2. Peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tupoksi serta penyelenggaraan pelayanan public;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang menguasai teknologi informasi, statistik dan persandia;
4. Peningkatan implementasi e-government Pemerintah Kabupaten Ciamis;
5. Penyediaan regulasi/kebijakan daerah yang mendukung tata kelola persandian, statistik dan komunikasi informasi public;
6. Optimalisasi penyediaan dan pengelolaan data statistik sektoral dalam mendukung pengambilan keputusan;

7. Optimalisasi penyediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat;
8. Optimalisasi penyelenggaraan persandian serta pengamanan data/informasi pemerintah daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Secara umum, peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai unit kerja pendukung penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah melaksanakan perumusan kebijakan di bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi, persandian dan telematika dan bidang pengelolaan statistik dan data elektronik, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi, persandian dan telematika dan bidang pengelolaan statistik dan data elektronik, pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Secara spesifik, peran Dinas Komunikasi dan Informatika terlihat pada kontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Ciamis yaitu:

Sesuai dengan visi **"MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI SEJAHTERA UNTUK SEMUA"**, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Ciamis 2019 –2024 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah yang mendukung pengembangan wilayah

Misi 3 : Mengembangkan perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan, potensi unggulan lokal dan pemberdayaan masyarakat

Misi 4 : Meningkatkan kualitas dan daya dukung lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Misi 5 : Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Misi 6 : Memperkuat otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa.

Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung Misi 5 Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan sasaran strategis pembangunan daerah Kabupaten Ciamis yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024

Tujuan Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
I	Misi 5	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	C	B	B	BB	BB
1.	Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Tatakelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan public berkualitas.	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks Kematangan SPBE	Nilai	2,64	2,64	2,80	2,90	3,00

B. Perjanjian Kinerja

Dengan telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja utama yang mencerminkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis untuk Tahun 2023, maka sasaran dan indikator tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Utama dimaksud sebagai berikut:

Tabel 2. 2

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP	Predikat	BB
		Level Maturitas SPIP	Level	3
		Kualitas Laporan Keuangan	Nilai	840
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	IKM Diskominfo	Nilai	85.00
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Kematangan SPBE	Nilai	2.90

C. Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran strategis organisasi, maka diperlukan rencana program dan kegiatan.

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3

Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Ciamis Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Pelayanan Informasi Publik Layanan Hubungan Media Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Komunitas
				Penyediaan/ pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/ Kota
		Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
			Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
				Membangun Metadata Statistik Sektoral

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah ditetapkan anggaran sebesar **Rp. 11.415.449.414** yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 2. 4

Anggaran Program dan Penanggung Jawab Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program	Pendanaan	Penanggung Jawab
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.376.454.750	Sekretariat
2.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp. 528.222.500	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3.	Program Aplikasi Informatika	Rp. 6.217.270.000	Bidang Aplikasi Informatika dan Layanan <i>E-Government</i>
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 233.675.800	Bidang Statistik
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 59.826.364	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

Data capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. 1

Data Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP	Predikat	BB	BB	100
		Level Maturitas SPIP	Level	3	3	100
		Kualitas Laporan Keuangan	Nilai	840	835.87	99.51
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	IKM Diskominfo	Nilai	85.00	97.075	114.20
3.	Meningkatnya Kematangan Indeks SPBE	Indeks Kematangan SPBE	Nilai	2.90	3.09	106.55

1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal ini sebagai upaya pendukung dalam keberhasilan pelaksanaan kinerja Urusan Kominfo, Urusan Statistik dan Urusan Persandian. Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki 3 indikator yaitu :

- a) Nilai LHE AKIP;
- b) Level Maturitas SPIP; dan
- c) Kualitas Laporan Keuangan

Secara lebih rinci, analisis ketercapaian kinerja masing-masing indikator disajikan sebagai berikut:

a) Nilai LHE AKIP

Nilai LHE AKIP merupakan indikator yang dihitung dalam mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.

Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan meningkatkan Nilai LHE AKIP adalah dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sasaran dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah para pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika. Melalui program ini tercipta sinergitas para pegawai, lingkungan kerja yang aman, nyaman dan disiplin terhadap peraturan, mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat dan berorientasi hasil, perencanaan yang baik dalam penyusunan program kerja setiap tahunnya sehingga persentase Nilai LHE AKIP tercapai 100%.

Capaian kinerja Nilai LHE AKIP selama 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 2

Capaian Kinerja Nilai LHE AKIP Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai LHE AKIP	Predikat	BB	BB	100%

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2023 dapat tercapai **100%** dan dapat direalisasikan sebesar **100%** sehingga kinerja di Tahun 2023 tercapai sebesar **100%** mencapai target.

Tabel 3. 3

Data Capaian Kinerja Nilai LHE AKIP Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Nilai LHE AKIP	Nilai	BB	BB	100 %	BB	BB	100%	BB	BB	100%

Realisasi target kinerja dari tahun 2021 sampai dengan 2023 nilai tetap dan target tercapai sehingga persentasenya **100%**.

b) Level Maturitas SPIP

Level Maturitas SPIP merupakan indikator yang dihitung dalam mengukur penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.

Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan meningkatkan Level Maturitas SPIP adalah dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sasaran dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah para pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika.

Melalui program ini tercipta kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan, pengamanan asset Diskominfo dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga persentasenya tercapai 100%.

Capaian kinerja Level Maturitas SPIP selama 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 4

Capaian Kinerja Level Maturitas SPIP Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	100%

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2023 dapat tercapai **100%** dan dapat direalisasikan sebesar **100%** sehingga kinerja di Tahun 2023 tercapai sebesar **100%** mencapai target.

Tabel 3. 5

Data Capaian Kinerja Level Maturitas SPIP Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	100 %	3	3	100%	3	3	100%

Realisasi target kinerja dari tahun 2021 sampai dengan 2023 nilai tetap dan target tercapai sehingga persentasenya **100%**.

c) **Kualitas Laporan Keuangan**

Kualitas laporan keuangan merupakan indikator hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan khususnya dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.

Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan meningkatkan Level Maturitas SPIP adalah dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sasaran dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah para pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika. Melalui program ini tercipta kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan, pengamanan asset Diskominfo dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga persentasenya tercapai 100%.

Capaian kinerja Level Maturitas SPIP selama 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 6

Capaian Kinerja Persentase Kualitas Laporan Keuangan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Kualitas Laporan Keuangan	Nilai	840	835.87	99.51 %

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2023 dapat tercapai **100%** dengan nilai 840 dan dapat direalisasikan sebesar **99.51%** dengan nilai 835.84 sehingga kinerja di Tahun 2023 tercapai sebesar **99.51%** belum mencapai target, akan tetapi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Adapun factor penghambat atau permasalahan belum tercapainya target tersebut diantaranya belum optimalnya koordinasi, masih perlu sinkronisasi antar dokumen.

Tabel 3. 7

Data Capaian Kinerja Kualitas Laporan Keuangan Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Kualitas Laporan Keuangan	Nilai	550	748.10	136.02 %	830	818.34	98.60%	840	835.84	99.51%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Persentase Kualitas Laporan Keuangan pada tahun 2023 (**99.51%**) mengalami peningkatan sebesar **0.91%** dibandingkan dengan tahun 2022 (**98.60%**) persentase 2021 lebih tinggi karena nilai target rendah, sedangkan dari tahun 2021 sampai dengan 2023 realisasi target selalu meningkat dan mencapai target.

2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan Kinerja Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal ini sebagai upaya pendukung dalam keberhasilan pelaksanaan kinerja Urusan Kominfo, Urusan Statistik dan Urusan Persandian. Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki 1 indikator yaitu IKM Diskominfo.

b) IKM Diskominfo

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sasaran dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah para pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika. Melalui program ini tercipta kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat selama 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 8

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	91.43	107.56 %

Kinerja pada tahun 2023 pada Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis melebihi target atau mencapai persentase 107.56%.

Tabel 3. 9

Data Capaian Kinerja Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84	85.31	101.56%	84.50	91.43	108.20%	85	91.43	107.56%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2023 (**107.56%**) dibandingkan dengan tahun 2022 (**108.20%**) secara persentase menurun akan tetapi secara realisasi target nilai tetap dan mencapai target. Dari tahun 2021 sampai dengan 2023 realisasi target selalu tercapai, dan melebihi 100%, hal tersebut karena terdapat beberapa target pendorong diantaranya sinergitas antar pegawai dan pengelolaan informasi yang kooperatif terhadap lingkungan sekitar.

3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kematangan Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk

memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Hal ini sebagai upaya pendukung dalam keberhasilan pelaksanaan kinerja Urusan Kominfo, Urusan Statistik dan Urusan Persandian. Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki 1 indikator yaitu Meningkatnya Kematangan Indeks SPBE.

a) Indeks Kematangan SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

Program yang mendukung pada indikator tersebut diantaranya Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat selama 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. 10

Capaian Kinerja Indeks Kematangan SPBE Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kematangan SPBE	Nilai	2.90	3.09	106.55 %

Tabel 3. 11

Data Capaian Kinerja Indeks Kematangan SPBE Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Kematangan SPBE	Nilai	2.64	3.32	125.75%	2.80	2.64	94.28%	2.90	3.09	106.55%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Persentase Indeks Kematangan SPBE pada tahun 2023 (**106.55%**) dibandingkan dengan tahun 2022 (**94.28%**) secara persentase menurun akan tetapi secara rata-rata persentase target dari tahun 2021-2023 adalah **108.86%** artinya penurunan tersebut tidak terlalu signifikan karena masih melebihi capaian target **100%**. Tahun 2023 mengalami peningkatan dan melebihi target 100%. Hal tersebut terdapat beberapa factor pendukung diantaranya koordinasi yang baik dan berkualitas, kerjasama yang baik antar pegawai dan optimalisasi sarana yang tersedia.

B. Perbandingan Capaian Kinerja

1. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kematangan SPBE ditingkat Provinsi

Tabel 3.12

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Barat

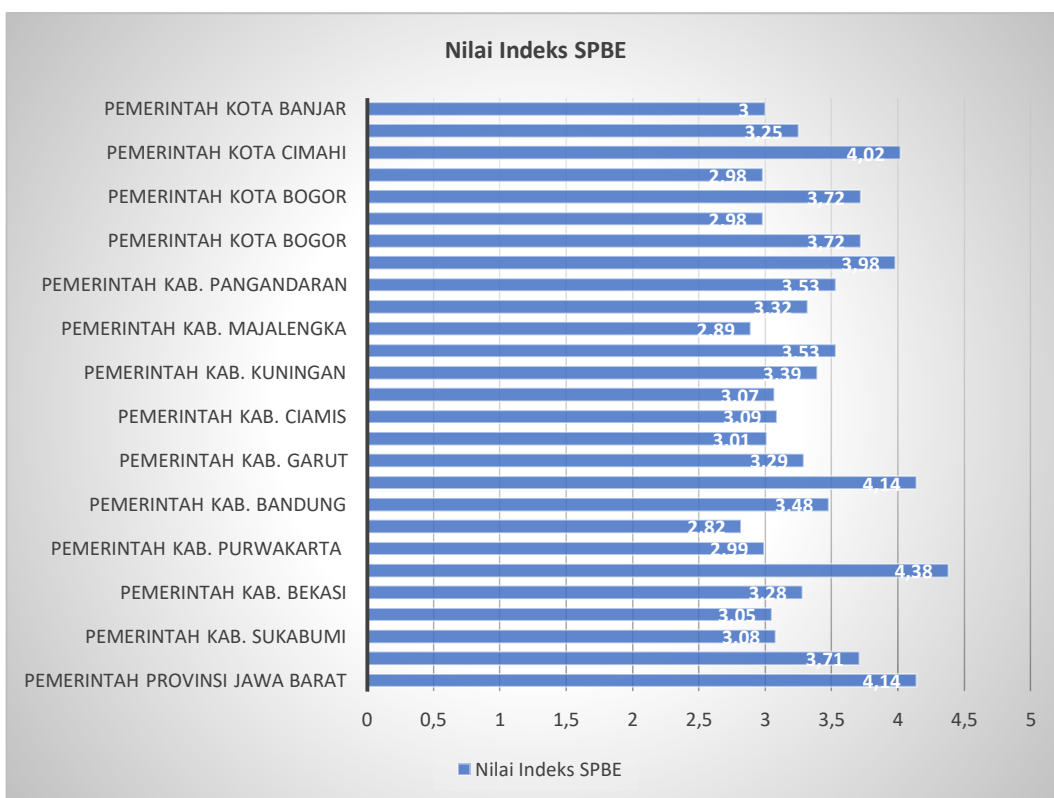
No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	4.14	Sangat Baik
2.	Pemerintah Kab. Bogor	3.71	Sangat Baik
3.	Pemerintah Kab. Sukabumi	3.08	Baik
4.	Pemerintah Kab. Cianjur	3.05	Baik
5.	Pemerintah Kab. Bekasi	3.28	Baik
6.	Pemerintah Kab. Karawang	4.38	Memuaskan
7.	Pemerintah Kab. Purwakarta	2.99	Baik
8.	Pemerintah Kab. Subang	2.82	Baik
9.	Pemerintah Kab. Bandung	3.48	Baik
10.	Pemerintah Kab. Sumedang	4.14	Sangat Baik
11.	Pemerintah Kab. Garut	3.29	Baik
12.	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	3.01	Baik
13.	Pemerintah Kab. Ciamis	3.09	Baik
14.	Pemerintah Kab. Cirebon	3.07	Baik
15.	Pemerintah Kab. Kuningan	3.39	Baik
16.	Pemerintah Kab. Indramayu	3.53	Sangat Baik
17.	Pemerintah Kab. Majalengka	2.89	Baik
18.	Pemerintah Kab. Bandung Barat	3.32	Baik
19.	Pemerintah Kab. Pangandaran	3.53	Sangat Baik
20.	Pemerintah Kota Bandung	3.98	Sangat Baik
21.	Pemerintah Kota Bogor	3.72	Sangat Baik
22.	Pemerintah Kota Sukabumi	2.98	Baik
23.	Pemerintah Kota Cirebon	3.55	Sangat Baik
24.	Pemerintah Kota Bekasi	3.01	Baik
25.	Pemerintah Kota Depok	3.70	Sangat Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
26.	Pemerintah Kota Cimahi	4.02	Sangat Baik
27.	Pemerintah Kota Tasikmalaya	3.25	Baik
28.	Pemerintah Kota Banjar	3.00	Baik

Sumber : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut Pemerintah Kabupaten Ciamis memiliki nilai 3.09 dengan predikat **Baik**. Kabupaten Ciamis memiliki nilai paling tinggi diantara 3 Kota dan 7 Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat atau pada Urutan/ Ranking ke **18 (delapan belas)** dengan jumlah 19 Kabupaten dan 9 Kota. Pemerintah Kabupaten Ciamis memiliki peningkatan nilai indeks dari tahun sebelumnya yaitu 2.64 dengan predikat yang sama yaitu **Baik**. Nilai Indeks SPBE dilihat melalui grafik sebagai berikut.

Grafik 2.1
 Nilai Indeks SPBE Provinsi Jawa Barat



2. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai LHE AKIP Diskominfo

Capaian Kinerja Nilai LHE AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis berdasarkan Urutan/ Ranking berada pada urutan ke 11, hal tersebut sebagaimana tersaji pada table berikut :

Tabel 3.13

Nilai LHE AKIP Tahun 2023

NO	NAMA SKPD	NILAI (LHP)	KATAGORI	URUTAN/RANKING
1	Inspektorat	88,3	A	1
2	Dinas Koperasi UKM	83,46	A	4
3	Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga	79,2	BB	6
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	74,36	BB	13
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	68,82	B	23
6	Sekretariat Daerah	84,43	A	2
7	Dinas Tenaga Kerja	79,78	BB	5
8	Dinas PUPRP	69,68	B	21
9	DISDUKCAPIL	63,79	B	27
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	74,87	BB	11
11	Dinas Kesehatan	78,25	BB	8
12	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	75,64	BB	10
13	Satuan Polisi Pamong Praja	52,27	CC	28
14	DPMD	66,24	B	26
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	72,96	BB	14
16	Dinas Peternakan dan Perikanan	67,1	B	24
17	Dinas Perhubungan	69,43	B	22
18	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	70	BB	20
19	Dinas Penanaman Modal dan PT	78,49	BB	7
20	Sekretariat DPRD	70,44	BB	19
21	BKPSDM	70,72	BB	17
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	71,53	BB	15
23	Dinas Sosial	71,48	BB	16
24	Dinas Pengendalian Penduduk dan KBKPPA	70,63	BB	18
25	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	75,95	BB	9
26	Dinas Pendidikan	66,71	B	25
27	Dinas Pariwisata	74,46	BB	12

Sumber : Inspektorat Kabupaten Ciamis

3. Perbandingan Capaian Kinerja IKM Dinas Komunikasi dan Informatika

IKM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis memiliki nilai 97,075 dengan Predikat A (Sangat Baik). Perbandingan dengan OPD lainnya Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peringkat ke 3 (tiga). Nilai IKM tersebut tercantum pada Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

C. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Tabel 3. 14

Data Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Ciamis Tahun 2023

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		4.376.454.750	4.064.161.573	312.293.177
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.460.000	18.335.000	2.125.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.880.000	5.755.000	125.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	600.000	250.000	350.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	960.000	960.000	-
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	600.000	-	600.000

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA	
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	960.000	960.000	-
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.540.000	5.090.000	450.000
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.920.000	5.320.000	600.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.717.220.860	2.494.346.992	222.873.868
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.708.080.860	2.485.206.992	222.873.868
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	-
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.140.000	4.140.000	-
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		154.384.283	148.703.925	5.680.358
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.870.000	5.898.400	2.971.600
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.935.000	13.750.125	184.875
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.000.000	78.000.000	-
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.485.000	4.481.400	1.003.600

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA	
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.094.283	46.574.000	1.520.283
4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.806.500	7.214.350	2.592.150
	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.806.500	7.214.350	2.592.150
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.198.300.300	1.169.050.906	29.249.394
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.550.300	55.416.906	133.394
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.142.750.000	1.113.634.000	29.116.000
6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276.282.807	226.510.400	49.772.407
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.132.807	91.400.000	9.732.807
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.150.000	20.110.400	39.600
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	155.000.000	115.000.000	40.000.000

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		528.222.500	528.222.500	-
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	528.222.500	528.222.500	-
	1 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	454.115.000	454.115.000	-
	2 Pelayanan Informasi Publik	47.807.500	47.807.500	-
	3 Layanan Hubungan Media	24.100.000	24.100.000	-
	4 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	600.000	600.000	-
	5 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.600.000	1.600.000	-
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		6.217.270.000	5.684.751.000	532.519.000
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.775.940.000	5.295.640.000	480.300.000
	1 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5.775.940.000	5.295.640.000	480.300.000

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA
2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	441.330.000	389.111.000	52.219.000
1	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	11.706.000	11.706.000	-
2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.360.000	3.360.000	-
3	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	383.276.500	333.560.000	49.716.500
4	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	42.987.500	40.485.000	2.502.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		233.675.800	223.238.700	10.437.100
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	233.675.800	223.238.700	10.437.100
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	219.270.800	212.033.700	7.237.100
2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	14.405.000	11.205.000	3.200.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		59.826.364	50.946.364	8.880.000

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	59.826.364	50.946.364	8.880.000
1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	59.826.364	50.946.364	8.880.000
JUMLAH		11.415.449.414	10.551.320.137	864.129.277

Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis memperoleh anggaran sebesar **Rp. 11.415.449.414,-** yang dapat direalisasikan sebesar **Rp. 10.551.320.137,-**. Dengan demikian kinerja keuangan tercapai sebesar **92.43 %**. Dari Kinerja tersebut diperoleh efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar **7.57%** atau **Rp. 864.129.277**.

D. Program Pendukung SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Program pendukung SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis diantaranya pada Urusan Kominfo, Urusan Statistik dan Urusan Persandian diantaranya :

- 1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
- 3) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- 4) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

E. Prestasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Berikut adalah daftar prestasi Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun 2023 :

Tabel 3.14

Tabel Prestasi/ Penghargaan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No	Nama Penghargaan	Nama Penerima	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan	Leading Sector	Tingkat
1.	Anugerah “Anindhita Wistara Data” Tahun 2023 sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Indeks Pembangunan Statistik Berpredikat	Pemerintah Kabupaten Ciamis	Badan Pusat Statistik Republik Indonesia	2023	Diskominfo	Nasional
2.	50 Kabupaten/ Kota Menuju Smart City Tahun 2023	Pemerintah Kabupaten Ciamis	Materi Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	2023	Diskominfo	Nasional

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaetn Ciamis selama tahun 2023. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis Renstra dan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun 2023.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaetn Ciamis pada tahun 2023 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Renstra sebesar 102.72 %. Sebanyak 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis berhasil tercapai melampaui target kinerja dengan faktor pendorong keberhasilan diantaranya tingginya komitmen, beragam inovasi serta kolaborasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis pada tahun 2023 berhasil memanfaatkan sumber daya organisasi sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 10.551.320.137** dengan total efisiensi sebesar **7.57%** atau senilai **Rp. 864.129.277**.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis terus berupaya mendukung Pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui berbagai inisiatif-inisiatif strategis, dengan harapan dapat tercapai pemerintahan yang kapabel, bersih dan akuntabel dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik.

Ciamis, 12 Februari 2024

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIAMIS

H. TINO ARMYANTO L.S., S.T., M.S.i.

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 197503042001121002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : H. TINO ARMYANTO LS. ST, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Dr. H. HERDIAT SUNARYA
Jabatan : Bupati Ciamis
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Dr. H. HERDIAT SUNARYA

Ciamis, 27 Nopember 2023
Pihak Pertama,


H. TINO ARMYANTO LS, S.T., M.Si.

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP	BB
		Level Maturitas SPIP	3
		Kualitas Laporan Keuangan	840
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	IKM Diskominfo	85,00
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Kematangan SPBE	2,90

No. PROGRAM

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Jumlah

ANGGARAN (Rp.)

4.376.454.750
528.222.500
6.217.270.000
233.675.800
59.826.364

11.415.449.414

Keterangan

BUPATI CIAMIS,



Dr. H. HERDIAT SUNARYA

Ciamis, 24 Nopember 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIAMIS



H. TINO ARMYANTO LS, S.T., M.Si.

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
SUMBER DANA APBD KABUPATEN**

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN						KET
	URAIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.415.449.414	10.551.320.137	92,43	
¹ URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				11.121.947.250	10.277.135.073	92,40	
1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEEMRINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				4.376.454.750	4.064.161.573	92,86	
	A PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			20.460.000	18.335.000	89,61	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	5.880.000	5.755.000	97,87	
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	79,00	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA/SKPD	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	600.000	250.000	41,67	
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA/SKPD	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	960.000	960.000	100,00	
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	600.000	-	0,00	
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	

URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN						KET
	URAIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	960.000	960.000	100,00	
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	5.540.000	5.090.000	91,88	
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1,00	100,00	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	5.920.000	5.320.000	89,86	
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1,00	100,00	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	B ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			2.717.220.860	2.494.346.992		
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	2.708.080.860	2.485.206.992	91,77	
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	294	294	100,00	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	5.000.000	5.000.000	100,00	
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	1	100,00	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	4.140.000	4.140.000	100,00	

URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN						KET
	URAIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	17	17	100,00	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	D ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			154.384.283	148.703.925	96,32	
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	8.870.000	5.898.400	66,50	
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	13.935.000	13.750.125	98,67	
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	78.000.000	78.000.000	100,00	
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	5.485.000	4.481.400	81,70	
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	100,00	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	48.094.283	46.574.000	96,84	
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	100,00	


URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN						KET
	URAIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	E PENGADAAN BARAG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			9.806.500	7.214.350		
	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	9.806.500	7.214.350	73,57	
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	100,00	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	F PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.198.300.300	1.169.050.906		
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	55.550.300	55.416.906	99,76	
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	12	100,00	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	1.142.750.000	1.113.634.000	97,45	
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	12	12	100,00	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	G PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			276.282.807	226.510.400		
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	101.132.807	91.400.000	90,38	
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	100,00	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					

URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN						KET
	URAIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	20.150.000	20.110.400	99,80	
		Keluaran sub kegiatan :Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10	100,00	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	3 Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	155.000.000	115.000.000	74,19	
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10	100,00	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
2) PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				528.222.500	528.222.500	100,00	
A PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	454.115.000	454.115.000	100,00	
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	1	100,00	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	2 Pelayanan Informasi Publik	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	47.807.500	47.807.500	100,00	
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	1	1	100,00	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	3 Layanan Hubungan Media	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	24.100.000	24.100.000	100,00	
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	29	29	100,00	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	5 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	600.000	600.000	100,00	

URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN						KET
	URAIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Unit	1	1	100,00	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	4 Penyediaan/ pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	1.600.000	1.600.000	100,00	
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Unit	1	-	0,00	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
3) PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	A PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.217.270.000	5.684.751.000		
				5.775.940.000	5.295.640.000		
	1 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	5.775.940.000	5.295.640.000	91,68	
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Titik Layanan	250	292	116,80	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	B PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA			441.330.000	389.111.000		
	1 Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	11.706.000	11.706.000	100,00	
Keluaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		Dokumen	2	2	100,00		
Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum							

URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN						KET
	URAIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Pengembangan Aplikasi Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	3.360.000	3.360.000	100,00	
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Dokumen	2	2	100,00	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	3 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	383.276.500	333.560.000	87,03	
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	1	100,00	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
	4 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	42.987.500	40.485.000	94,18	
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	100,00	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					
2 URUSAN PEMERINTAHN BIDANG STATISTIK				233.675.800	223.238.700		
1) PROGRAM PENYELNGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				233.675.800	223.238.700		
A PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	219.270.800	212.033.700	96,70	
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Data	960	960	100,00	
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					

URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN						KET		
	URAIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
	2 Membangun Meta Data Statistik Sektoral	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	14.405.000	11.205.000	77,79			
		Keluaran sub kegiatan : Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Data	480	480	100,00			
		Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum							
3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				59.826.364	50.946.364				
1) PROGRAM PENYELNGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMAN INFORMASI				59.826.364	50.946.364				
	A PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/ Kota	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	59.826.364	50.946.364	85,16		
			Keluaran sub kegiatan : Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	OPD	1	1	100,00		
			Sumber dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						



 Ciamis, 5 Januari 2024
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN CIAMIS
 H. TINO ARMYANTO L.S., S.T., M.Si.
 Pembina Tk. I, IV/b
 NIP. 197503042001121002



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE 2023

PEMERINTAH KAB.
CIAMIS



DIGITAL GOVERNMENT
SPBE SUMMIT
KEMPINSKI GRAND BALLROOM - JAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

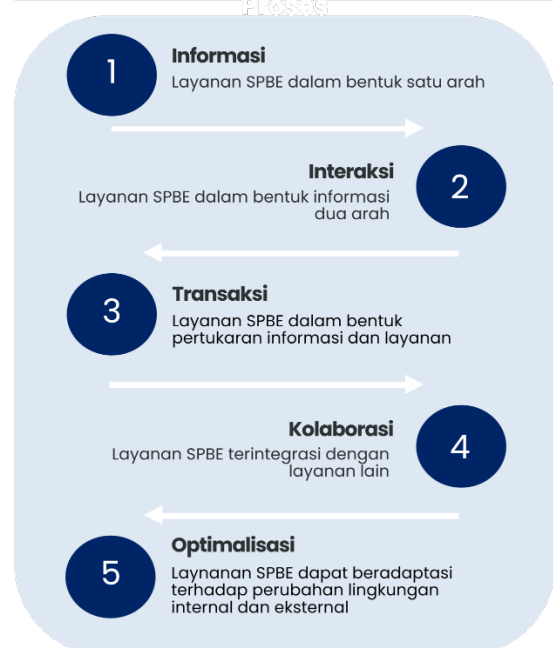
Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi

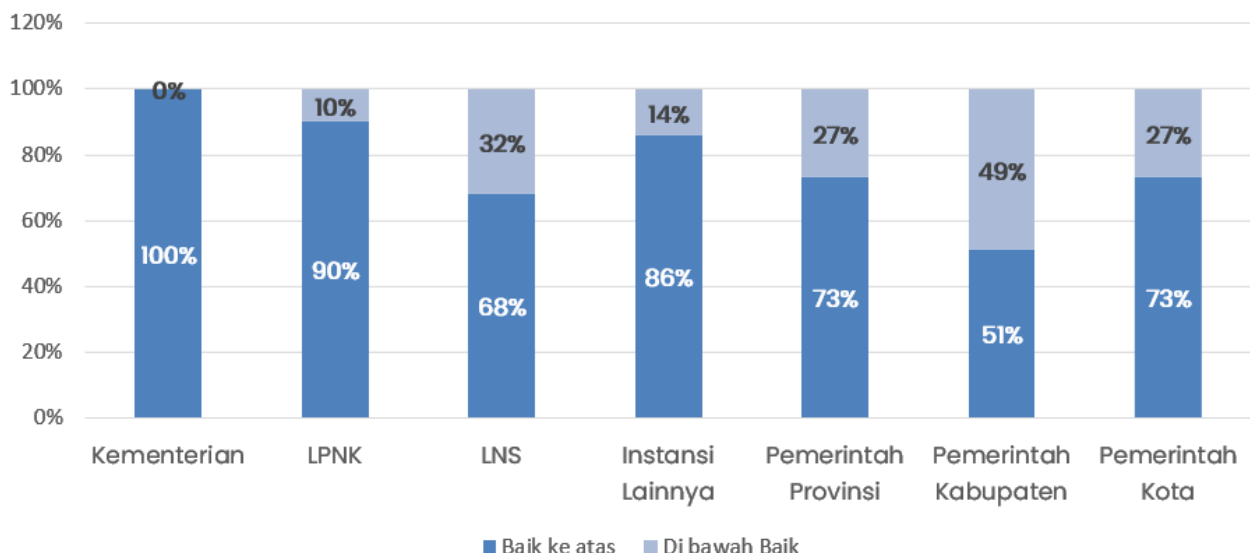


EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

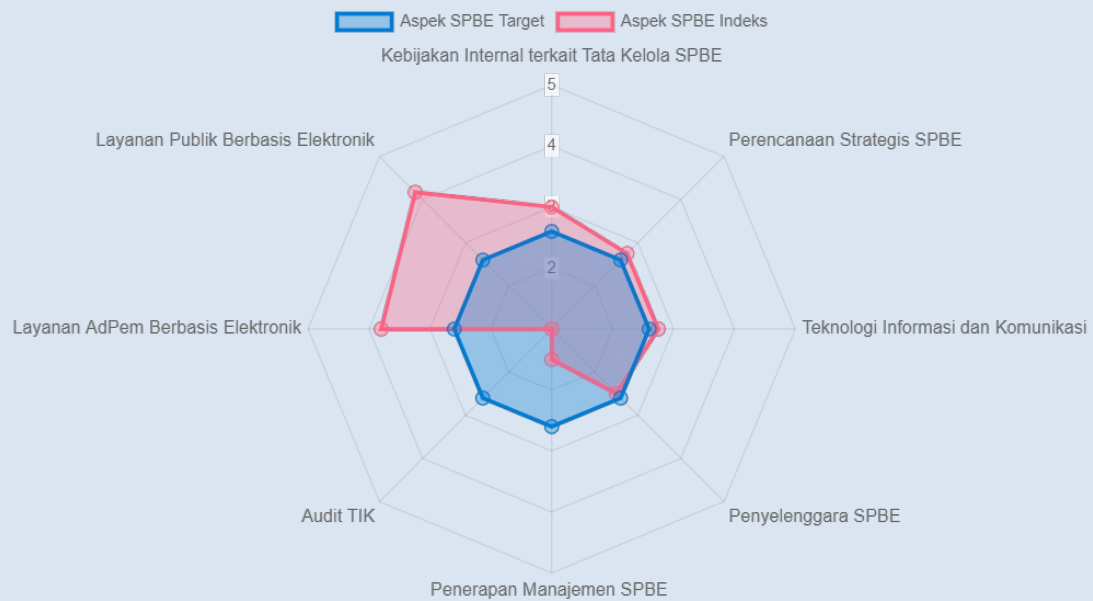
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)</p>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6		Cukup																			
5	< 1,8		Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50
Domain Kebijakan	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2023



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	3,09
Domain Kebijakan SPBE	3,00
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	3,00
Domain Tata Kelola SPBE	2,70
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	2,75
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	2,75
<i>Penyelenggara SPBE</i>	2,50
Domain Manajemen SPBE	1,36
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,50
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	3,95
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,80
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,17

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE sudah dipenuhi oleh Kabupaten Ciamis. Selanjutnya perlu dilakukan reviu secara berkala oleh Tim Koordinasi SPBE Daerah.

- Kekuatan
Belum ditemukan adanya kekuatan pada Aspek Kebijakan Internal.
- Kelemahan
Belum ditemukan adanya kelemahan pada Aspek Kebijakan Internal.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Ciamis adalah dengan adanya Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE dengan keterlibatan perangkat daerah pengelola TIK dan perencana dalam rencana anggaran SPBE. Selain itu Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE dan Inovasi Proses Bisnis SPBE sudah cukup baik. Tinggal dilakukan reviu berkala penyesuaian-penyesuaian dengan aturan terbaru terutama kelengkapan sesuai perpres 132 tahun 2022.

- Kekuatan
Belum ditemukan adanya kekuatan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE.
- Kelemahan
Perlu adanya perbaikan dalam tata kelola rencana dan anggaran SPBE. Rencana dan Anggaran SPBE masih belum sepenuhnya di koordinasikan dengan TIM Koordinasi SPBE.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Ciamis adalah dengan adanya Pembangunan Aplikasi SPBE melalui Keputusan Bupati Ciamis Nomor 049/023/Diskominfo.04 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis, Layanan Pusat Data melalui Keputusan Bupati Ciamis Nomor 049/016/Diskominfo.04. tentang Daftar Domain dan Subdomain Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Dan juga telah adanya prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data Daerah pada Keputusan Bupati Ciamis Nomor 069/Kpts-173/Diskominfo. Selain itu juga telah diatur pemanfaatan layanan dalam Keputusan Bupati Ciamis nomor 000.8.3.3/13807/Diskominfo.01/2022.

- Kekuatan
Belum ditemukan adanya kekuatan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Kelemahan
Tata Kelola Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masih diterapkan pada sebagian Perangkat Daerah. Koordinasi dalam kerangka tata kelola yang sama perlu disusun untuk digunakan di seluruh perangkat daerah.

D. Penyelenggara SPBE

Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Ciamis sudah terpenuhi melalui data dukung yang disajikan. Tim Koordinasi beserta program kerja sudah ditetapkan. Begitu juga dengan pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE secara internal maupun eksternal.

- Kekuatan
Masih belum ditemukan adanya kekuatan pada Aspek Penyelenggara SPBE.
- Kelemahan
Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Ciamis perlu untuk memperkuat koordinasi secara internal Tim Koordinasi SPBE Daerah. Meskipun telah terbentuk melalui Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 800.01/Kpts.75-Huk/Tahun 2023, namun program kerja dari tim koordinasi untuk mengawal penerapan SPBE melalui Peta Rencana SPBE masih belum optimal. Evaluasi dan tindak lanjut dari program kerja Tim Koordinasi masih belum ada.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Beberapa Aspek Penerapan Manajemen SPBE di Kabupaten Ciamis yang telah dipenuhi dan dilaksanakan adalah : Manajemen Aset TIK, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Layanan. Seluruh Aspek Manajemen telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Ciamis Nomor 049/Kpts.04/Diskominfo.04/2023 Tentang Peta Rencana SPBE Kabupaten Ciamis, Bab IV halaman 13 dan 14. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih perlu ditindaklanjuti

dengan seksama melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada. Peran Tim Koordinasi dalam aspek Manajemen SPBE ini perlu ditingkatkan lagi.

- Kekuatan
Belum ditemukan adanya kekuatan dalam Aspek Penerapan SPBE.
- Kelemahan
Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini Kabupaten Ciamis masih perlu ditingkatkan dalam penyusunan pedoman dan pelaksanaannya terutama untuk Penerapan Manajemen Resiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Penerapan Data, Manajemen Aset TIK dan Manajemen Perubahan.

F. Audit TIK

Seluruh indikator dalam Aspek Pelaksanaan Audit TIK di Kabupaten Ciamis masih belum dipenuhi. Pelaksanaan Audit TIK di Kabupaten Ciamis saat ini masih belum memanfaatkan audit tools BRIN.

- Kekuatan
Belum ditemukan adanya kekuatan pada aspek audit TIK.
- Kelemahan
Perlu segera dinisiasi Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh BRIN dan BSSN.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik telah dipenuhi oleh Kabupaten Ciamis.

- Kekuatan
Pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Ciamis secara umum baik dan kolaboratif, Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Layanan Kepegawaian Perlu dilakukan optimalisasi layanan dengan melakukan agenda reviu berkala.
- Kelemahan
Tidak ditemukan adanya kelemahan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang dipenuhi oleh Kabupaten Ciamis adalah dengan adanya: Layanan Pengaduan Pelayanan Publik dan Layanan Publik OSS, dimana sudah memanfaatkan aplikasi umum berbagi pakai. Perlu optimalisasi dari aspek kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan yang masih berpotensi.

- Kekuatan
Pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik di Kabupaten Ciamis sebagian kecil kolaboratif diantaranya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, Layanan Publik Sektor 3 yang diselenggarakan dengan memanfaatkan aplikasi umum berbagi pakai.
- Kelemahan
Namun di aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik di Kabupaten Ciamis masih sebagian besar layanan yaitu Layanan Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), yang perlu diupayakan untuk bisa meningkat menjadi kolaboratif. Tentu ini harus melihat pada potensi-potensi yang sudah teridentifikasi pada arsitektur SPBE domain probis, data dan layanan yang sudah diinventarisir dari seluruh perangkat daerah.

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE di Kabupaten Ciamis. Tingkat kematangan pada seluruh domain Kebijakan dan Tata Kelola menuju ke proses yang mulai terintegrasi dan terukur. Begitu juga dengan domain Layanan juga menuju perbaikan menjadi kolaboratif, dimana beberapa aplikasi layanan publik maupun layanan administrasi pemerintah sudah mulai terintegrasi secara keseluruhan. Namun pada domain Manajemen perlu adanya perbaikan selaras dengan semakin baiknya kematangan di tiga domain lainnya agar penerapan SPBE lebih optimal dan efisien. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Ciamis sudah dapat menggambarkan predikat BAIK dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Kabupaten Ciamis adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE, Layanan Administrasi dan Layanan Publik Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah terkategori baik.

Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya peraturan Bupati Ciamis Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan revisi kebijakannya melalui Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. kemudian diikuti dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Selanjutnya perlu di lakukan reuiu secara berkesinambungan untuk diseuaikan dengan muatan dan mandat yang ada di Perpres 95/2018 dan Perpres 132/2022.

Namun disisi lain, Kabupaten Ciamis masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek 5 dan 6 yaitu Penerapan Manajemen SPBE dan Pelaksanaan Audit TIK. Mengawal implementasi SPBE dengan pelaksanaan di 8 area manajemen juga perlu dilakukan dengan lebih serius (dengan mamastikan agenda perencanaannya sudah sesuai dengan peta rencana yang dicanangkan). Adapun pelaksanaan manajemen di 8 area juga menjadi pekerjaan rumah yang serius selain pelaksanaan audit internal yang masih belum berjalan dan perlunya segera mengagendakan pemanfaatan tools audit dari BRIN.

Apresiasi/Saran Perbaikan:

Apresiasi layak diberikan kepada Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan internalnya yang secara umum sudah baik dibandingkan pada evaluasi sebelumnya. Terutama dalam hal komitmen penyelenggara SPBE dan penyelenggaraan layanan adpem terpadu layak di apresiasi.

Tentu saja ini perlu dipertahankan, dijaga konsistensinya oleh tim koordinasi internal dan komitmen nya oleh para pimpinan perangkat daerah. Sehingga perlu ditingkatkan (terutama terkait manajemen dan audit TIK). Berikut saran perbaikan yang perlu ditindaklanjuti:

1. Perlunya dilakukan reuiu terhadap arsitektur dan peta rencana SPBE sesuai dengan cakupan dan standar peraturan yang berlaku (Perpres 95, 132 dan SE 18)
2. Perlunya penjelasan yang dipersyaratkan oleh tingkat kematangan dengan lebih presisi (jangan mengambang)
3. Pentingnya membuat narasi yang terpointer, jelas, komprehensif agar bisa menjadi pengetahuan bagi tim koordinasi internal (antisipasi adanya pergantian personil) dan juga mempermudah pemahaman para evaluator eksternal yang dari tahun ke tahun berbeda. Sehingga diskrepansi/gap pemahaman bisa ditekan.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	3
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	3
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5